



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realitas pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

b. Manajemen

Membantu pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.



Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyajikan/menyediakan informasi yang bermanfaat tentang :

- a. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah sumber daya ekonomi, alokasi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- d. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, asset, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) pendapatan
- b) belanja
- c) transfer
- d) surplus/defisit
- e) pembiayaan
- f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos asset dan



kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) kas dan setara kas
- b) investasi jangka pendek
- c) piutang pajak dan bukan pajak
- d) persediaan
- e) investasi jangka panjang
- f) asset tetap
- g) kewajiban jangka pendek
- h) kewajiban jangka panjang
- i) ekuitas dana

Laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas

Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit Laporan Operasional pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir dari Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari :

- a. Pendapatan
- b. Beban Operasi meliputi :
 - Beban Pegawai
 - Beban Barang dan Jasa
 - Beban Penyusutan
 - Beban Lain – Lain
 - Surplus/Defisit LO

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemerian
- e. ksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- f. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2017, tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

Bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun pelaporan keuangan dalam format yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan Laporan Keuangan lainnya yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional serta Laporan Perubahan Ekuitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).



1.1. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD.



Bab 5 Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 5.2 Penjelasan Pos - Pos Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penutup

Lampiran Tambahan



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Pada triwulan III 2018, perekonomian Jawa Tengah mencatatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5,25% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2018 yang tercatat sebesar 5,48% (yoy). Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat pada level 5,17% (yoy). Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan triwulan laporan didorong oleh melemahnya konsumsi rumah tangga seiring dengan normalisasi permintaan pasca Ramadan dan Idul Fitri. Kembali menguatnya impor luar negeri di tengah terbatasnya perbaikan ekspor luar negeri juga menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan. Namun demikian, akselerasi investasi yang didorong oleh berlanjutnya investasi nonbangunan menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih dalam. Ditinjau dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan mencatatkan perlambatan, sedangkan kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mengalami perbaikan dibandingkan triwulan II 2018.

Pada triwulan III 2018, perekonomian Provinsi Jawa Tengah menyumbang 8,65% terhadap perekonomian Nasional, atau 14,60% terhadap perekonomian kawasan Jawa. Nilai ini tidak banyak berubah dibandingkan periode sebelumnya. Dengan besar sumbangan tersebut, Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian nasional maupun kawasan Jawa, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Perekonomian kawasan Jawa secara dominan masih disumbang oleh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan pangsa dari kedua daerah ini mencapai lebih dari 50%.

Inflasi Jawa Tengah pada triwulan III 2018 tercatat sebesar 2,79% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,72% (yoy). Sementara itu, secara triwulanan Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0,12% (qtq), berbalik arah dibandingkan triwulan II 2018 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,69 % (qtq). Laju inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan laporan tersebut tercatat lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,88% (yoy), serta lebih rendah dibandingkan inflasi Kawasan Jawa yang tercatat sebesar 2,98% (yoy). Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kawasan Jawa, pada triwulan III 2018 Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi dengan inflasi terendah ketiga setelah Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercatat masing-masing sebesar 2,76% (yoy) dan 2,77%(yoy). Sejak tahun 2017, inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah pada



periode triwulan III secara konsisten mencatatkan nilai di bawah realisasi inflasi tahunan kawasan Jawa. Selanjutnya, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan Jawa Tengah sepanjang bulan Juli September 2018 mencatatkan tren deflasi yang berlangsung lebih awal dibandingkan provinsi lainnya di Kawasan Jawa. Peningkatan tekanan inflasi tahunan tersebut terutama disumbangkan oleh kelompok Bahan Makanan serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar. Penurunan inflasi bulanan kedua kelompok tersebut pada triwulan laporan terpantau lebih lambat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017.

(sumber: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomiregional/jateng/Pages/KEKR-Provinsi-Jawa-Tengah-November-2018.aspx>)

2.3. Kebijakan Keuangan

Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan untuk “Meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah. Dinamika perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat Undang-Undang menuntut perubahan Organisasi di Lingkungan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk diantaranya adalah pembentukan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Provinsi Jawa Tengah. DISPORAPAR merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu dalam rangka mewujudkan kepemudaan olahraga dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah yang berkualitas dan berdaya saing.

Kebijakan keuangan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat dituangkan dalam program kerja tahun 2018, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
5. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan
6. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan / Organisasi Olah Raga
7. Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
8. Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
11. Program Pengembangan Kemitraan
12. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2018

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.511.514.000	12.111.019.627	100%	89,63%	
2.10.01.01.0001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.500.000	29.775.300	100%	66,91%	sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.01.0002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.743.000.000	1.530.191.269	100%	87,79%	efisiensi
2.10.01.01.0003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	63.200.000	49.500.000	100%	78,32%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.01.0004	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	200.000.000	147.779.915	100%	73,89%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.01.0005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	2.035.508.000	2.032.146.238	100%	99,83%	
2.10.01.01.0006	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	175.000.000	175.000.000	100%	100,00%	
2.10.01.01.0007	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	159.000.000	158.999.915	100%	100,00%	
2.10.01.01.0008	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	70.000.000	100%	100,00%	
2.10.01.01.0010	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.900.000	60.147.500	100%	87,30%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.01.0011	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.600.000	17.045.000	100%	91,64%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.01.0013	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	295.000.000	263.178.900	100%	89,21%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.01.0014	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	1.200.000.000	1.152.273.786	100%	96,02%	
2.10.01.01.0015	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	3.468.511.000	3.189.394.073	100%	91,95%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.01.0017	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	86.000.000	49.505.000	100%	57,56%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan



Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.01.0007.01.0001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat PPLOP	16.600.000	14.374.800	100%	86,60%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.0007.01.0002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PPLOP	300.000.000	88.571.848	100%	29,52%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.0007.01.0004	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah PPLOP	60.000.000	37.849.769	100%	63,08%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.0007.01.0006	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor PPLOP	50.000.000	50.000.000	100%	100,00%	
2.10.01.0007.01.0007	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan PPLOP	25.000.000	15.620.250	100%	62,48%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.0007.01.0008	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PPLOP	35.000.000	35.000.000	100%	100,00%	
2.10.01.0007.01.0010	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PPLOP	11.900.000	10.078.000	100%	84,69%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.0007.01.0011	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan PPLOP	60.000.000	58.212.000	100%	97,02%	
2.10.01.0007.01.0013	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman PPLOP	56.550.000	40.020.000	100%	70,77%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.0007.01.0014	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah PPLOP	200.000.000	193.784.030	100%	96,89%	
2.10.01.0007.01.0015	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran PPLOP	344.800.000	332.800.000	100%	96,52%	
2.10.01.0007.01.0017	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi PPLOP	10.000.000	9.000.000	100%	90,00%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.073.550.000	7.780.562.217	100%	96,37%	
2.10.01.02.0009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	747.500.000	732.950.200	100%	98,05%	Terpenuhinya Kebutuhan Dinas
2.10.01.02.0011	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	500.000.000	470.215.391	100%	94,04%	Terpenuhinya Kebutuhan Dinas
2.10.01.02.0015	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	247.550.000	245.780.000	100%	99,28%	Terpenuhinya Kebutuhan Dinas
2.10.01.02.0017	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	4.250.000	4.250.000	100%	100,00%	
2.10.01.02.0018	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	7.500.000	7.500.000	100%	100,00%	
2.10.01.02.0024	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1.355.115.000	1.334.680.427	100%	98,49%	
2.10.01.0006.02.0009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balinfopasporapar	723.500.000	624.441.000	100%	86,31%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.0006.02.0011	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balinfopasporapar	18.000.000	2.036.000	100%	11,31%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.0006.02.0014	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balinfopasporapar	12.000.000	12.000.000	100%	100,00%	
2.10.01.0006.02.0015	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balinfopasporapar	100.000.000	47.133.000	100%	47,13%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.0006.02.0024	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balinfopasporapar	151.454.000	139.740.000	100%	92,27%	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan
2.10.01.0007.02.0009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor PPLOP	235.031.000	233.995.000	100%	99,56%	
2.10.01.0007.02.0015	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga PPLOP	30.000.000	29.525.000	100%	98,42%	
2.10.01.0007.02.0024	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor PPLOP	3.941.650.000	3.896.316.199	100%	98,85%	



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	300.000.000	286.081.000	100%	95,36%	
2.10.01.04.0001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	220.000.000	219.725.000	100%	99,88%	
2.10.01.04.0003	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000	66.356.000	100%	82,95%	efisiensi makan minum rapat kegiatan, efisiensi pelaksanaan bintek yang semula dilaksanakan di luarkota, tetapi dilaksanakan di semarang



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.01.0002.06	Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	73.472.869.000	67.782.588.290	100%	92,26%	
2.10.01.0002.06.0002	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	49.132.000.000	46.580.907.433	100%	94,81%	
2.10.01.0002.06.0003	Kegiatan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	4.000.000.000	2.045.175.699	100%	51,13%	kegiatan PSOJP (Pembinaan Sentra Olahraga Jangka Panjang) 2019 pengadaan pakaian olahraga, gagal lelang karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi senilai 533,809,000; tidak semua cabor mengambil anggaran try out dan pelatihan di luar daerah, sehingga anggaran monitoring pun tidak terserap secara maksimal
2.10.01.0002.06.0004	Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani	3.579.000.000	3.402.786.068	100%	95,08%	Efisiensi makan minum kegiatan
2.10.01.0002.06.0005	Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga	2.250.000.000	2.107.911.069	100%	93,68%	sisa LS mobilitas darat untuk borobudur marathon dan efisiensi
2.10.01.0007.06.0001	Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)	14.511.869.000	13.645.808.021	100%	94,03%	Eisiensi dan sisa LS

Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, memiliki 4 indikator kinerja program, dengan realisasi seluruhnya yaitu Jumlah partisipan kompetisi keolahragaan dan fasilitas olahraga pendidikan, rekreasi dan tradisional dengan realisasi 42.700 orang melebihi dari target sebesar 42.669; Jumlah atlet yang dibina melalui PPLPD dengan realisasi 170 atlet sesuai target, dan meningkat dari tahun sebelumnya 165 atlet; dan Jumlah cabang olahraga unggulan (cabor) dengan realisasi 12 cabor sesuai target, dan meningkat dari tahun sebelumnya 10 cabor; serta Persentase peningkatan prestasi olah raga dengan realisasi sebesar 25% sesuai target dan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 16%.

Dampak positif diselenggarakannya program tersebut yaitu tersedianya olahragawan potensial melalui kompetisi olahraga yang berjenjang, sebagai embrio prestasi Jawa Tengah pada event nasional dan internasional, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat melalui olahraga.

Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dengan hasil terselenggaranya PPLPD sebanyak 170 orang; Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan hasil



Meningkatnya Kualitas Atlet Olahraga 23.678 orang; Kegiatan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dengan hasil Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar Jawa Tengah 380 orang; Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani dengan hasil Terselenggaranya Haornas yang diikuti 7.700 orang, olah raga masyarakat 1.200 orang, Forda/FORMI 450 orang dan olahraga massal sebanyak 90.270 orang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.01.0001.02	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan	1.628.600.000	1.439.280.289	100%	88,38%	
2.10.01.0001.02.0001	Kegiatan Pengembangan Pola Kemitraan	200.000.000	200.000.000	100%	100,00%	
2.10.01.0001.02.0003	Kegiatan Pengembangan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	301.000.000	281.547.500	100%	93,54%	Efisiensi perjalanan dinas
2.10.01.02.0002	Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	1.127.600.000	957.732.789	100%	84,94%	Efisiensi Keg. KONI (RAT KONI), Efisiensi Perjalanan dinas

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga, dengan indikator Jumlah fasilitasi pengembangan kemitraan dengan realisasi 351 orang 3 paket melebihi dari target sebanyak 350 orang dan 3 paket dan menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 379 orang 3 paket.

Dampak positif diselenggarakannya program ini, adalah tersinerginya program/kegiatan antara Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas yang mampu urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah Pengembangan Pola Kemitraan dengan hasil meningkatnya Kemitraan dengan Stakeholder sebanyak 70 orang/35 lembaga melalui 3 MOU; Pengembangan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan dengan hasil Terwujudnya Pengembangan Sistem Informasi kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (SIM Porapar) dan Jateng *In Your Hand* (Aplikasi Pariwisata); Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga dengan hasil Draf dokume Renstra OPD (Tahun 2019-2024) dan Tersedianya 1 dokumen Data Kepemudaan dan Keolahragaan; dan Pengembangan Sinergitas dan Evaluasi Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga dengan hasil Keserasian kebijakan pembangunan



kepemudaan, Perda Kepemudaan, Pembinaan SDM bidang, Kepemudaan dan keolahraagaan serta Evaluasi pengawasan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.01.0002.01	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olah Raga	3.071.800.000	2.954.541.000	100%	96,18%	
2.10.01.0002.01.0001	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga	800.000.000	784.711.000	100%	98,09%	
2.10.01.0002.01.0002	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga	1.681.800.000	1.592.875.000	100%	94,71%	Efisiensi perjalanan dinas dan sisa LS
2.10.01.0002.01.0003	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga	240.000.000	239.685.000	100%	99,87%	
2.10.01.0002.01.0004	Kegiatan Pengembangan industri Olahraga	350.000.000	337.270.000	100%	96,36%	

Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga, dengan indikator Peningkatan kualitas SDM olahraga, mutu manajemen organisasi olahraga, pengembangan Iptek dan industri olahraga dengan realisasi 1.545 orang sesuai target dan sama tahun sebelumnya.

Dampak positif diselenggarakannya program tersebut adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas yang memiliki kompetensi dan sertifikasi SDM olahraga, meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah yang didukung dengan IPTEK keolahraagaan dan menurunkan angka kemiskinan pemuda dalam pengelolaan Industri olahraga.

Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga dengan hasil Meningkatnya Kualitas Pelatih dalam mengembangkan prestasi olahraga di Jawa Tengah 276 orang, Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Kelembagaan Olahraga dengan hasil Peningkatan kualitas organisasi olahraga sebanyak 75 orang dan 50 sanggar; Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga dengan hasil pemetaan pemanduan bakat pelajar kab/kota sebanyak 400 orang; pemanduan bakat anak panti asuhan dan berkebutuhan khusus sebanyak 350 orang, dan Kegiatan Pengembangan Industri Olahraga dengan hasil terlatihnya pelaku industri jasa olahraga sebanyak 200 orang.



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Tserterapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.01.0001.03	Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1.200.000.000	1.091.434.350	100%	90,95%	
2.10.01.0001.03.0001	Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster	1.200.000.000	1.091.434.350	100%	90,95%	ada 2 kabupaten yang tidak mengirimkan peserta kegiatan, sehingga realisasi hanya 19 kelompok

Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, dengan indikator Jumlah kewirausahaan pemuda dengan realisasi 2.000 orang sesuai target dan sama tahun sebelumnya. Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota yaitu Jumlah kewirausahaan pemuda tertinggi dari Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kebumen sebanyak 7 kelompok atau 35 orang dan terendah di Kabupaten Banyumas karena tidak mengirimkan peserta.

Dampak positif diselenggarakannya program tersebut adalah meningkatnya ketrampilan pemuda dalam rangka pengentasan kemiskinan pemuda melalui kewirausahaan berbasis klaster bidang membatik, pengolahan keripik ikan, perbengkelan dan menjahit.

Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster dengan hasil terlaksananya Tersedianya Pemuda yang terlatih wirausaha dalam berbagai klaster sebanyak 2.000 orang.



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.01.0001.04	Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	9.854.000.000	9.464.235.379	100%	96,04%	
2.10.01.0001.04.0001	Peningkatan dan Pengembangan Generasi Muda	2.850.000.000	2.713.305.000	100%	95,20%	
2.10.01.0001.04.0002	Kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda	5.000.000.000	4.947.900.000	100%	98,96%	
2.10.01.0001.04.0003	Peningkatan Daya Tangkal Pemuda terhadap Pengaruh Destruktif	354.000.000	326.080.000	100%	92,11%	
2.10.01.0001.04.0004	Seleksi dan Pemantapan Paskibraka dan Lomba TUB/BB	1.250.000.000	1.080.920.379	100%	86,47%	Efisiensi pada keg. Pemantapan paskibraka
2.10.01.0001.04.0005	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	400.000.000	396.030.000	100%	99,01%	

Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan, memiliki 2 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target yaitu Jumlah Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) dengan realisasi 200 orang sesuai dan sama tahun sebelumnya; dan Jumlah organisasi pemuda yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program dengan realisasi sebanyak 65 kurang dari target 63 dan meningkat dari tahun sebelumnya 63 organisasi kepemudaan.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota yaitu jumlah pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) di 15 kabupaten Provinsi Jawa Tengah yang masuk dalam kategori Zona Merah, sebanyak 200 orang dengan rincian: setiap Kabupaten diambil 2 kecamatan terpilih, masing-masing kecamatan dipilih 2 desa, dimana desa tersebut ditempatkan 2 orang sarjana yang akan melaksanakan kegiatan selama 10 bulan.

Dampak positif diselenggarakannya pelaksanaan program adalah mengentaskan kemiskinan masyarakat desa lokasi PKKP untuk mengenal dan mengolah potensi ekonomi desa.

Kegiatan yang mendukung program ini antara lain Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Generasi Muda dengan hasil Meningkatnya pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Bernegara bagi 1.500 Generasi Muda, Terpilihnya 105 peserta Calon Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi, Terpilihnya Peserta Kapal Pemuda Nusantara sebanyak 1.675 orang; Kegiatan Seleksi dan Pemantapan Paskibraka dan Lomba



TUB/BB dengan hasil Terpilihnya Tim Paskibraka sebanyak 70, Lomba TU-BB siswa SMA/SMK/MA sebanyak 126, Pemantapan Tim Paskibraka sebanyak 37 orang; dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dengan hasil Terbentuknya kesadaran Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Membangkitkan Sikap Peduli Lingkungan bagi OK.

Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Fungsi : 2.10
Sub Fungsi : 2.10.01
Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.01.0003.05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	147.397.839.000	142.785.382.485	100%	96,87%	
2.10.01.0003.05.0001	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan	147.397.839.000	142.785.382.485	100%	96,87%	

Program Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan, memiliki 3 indikator kinerja program, seluruhnya mencapai target, yaitu Jumlah klub olahraga dengan realisasi sebanyak 105 klub sesuai target; Jumlah peningkatan venue Jatidiri 2 venue (Stadion dan GOR) dengan realisasi 2 venue sesuai target; dan Persentase cakupan venue sport and youth center Jatidiri yang memadai dengan realisasi 93% tidak mencapai target 100% dan meningkat dari tahun sebelumnya 30%.

Dampak positif diselenggarakannya program tersebut adalah tersedianya sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Jawa Tengah yang berstandar nasional maupun internasional.

Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan dengan hasil terselenggaranya Renovasi Stadion Jatidiri, Renovasi GOR Jatidiri 1 paket.



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Fungsi : 2.10

Sub Fungsi : 2.10.01

Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.01.0003.08	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	20.763.887.000	18.215.630.680	100%	87,73%	
2.10.01.0003.08.0002	Kegiatan Peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata	1.000.000.000	969.351.000	100%	96,94%	
2.10.01.0003.08.0003	Kegiatan Pengembangan potensi keunikan Lokal Masyarakat & Alam Menjadi Atraksi Wisata	12.757.887.000	11.269.921.445	100%	88,34%	gagal lelang pekerjaan di Goa Sepalwan (aset Pemprov di Kab. Purworejo), karena ada perubahan pekerjaan yang disesuaikan dengan RTRW yang disusun Kab. Purworejo, sehingga waktu pengajuan ke lelang umum tidak mencukupi.
2.10.01.0005.08.0004	Kegiatan Pemantapan Kinerja SDM Pariwisata	6.003.000.000	5.160.241.085	100%	85,96%	siswa lelang, efisiensi fasilitasi event keg. Pengembangan komunitas ekonomi kreatif di Jawa Tengah, efisiensi perjalanan dinas luar daerah
2.10.01.0005.08.0005	Kegiatan Perkuatan Kualitas Kompetensi Remaja, Mas & Mbak Duta Wisata Bidang Pariwisata	450.000.000	437.013.350	100%	97,11%	
2.10.01.0006.08.0001	Kegiatan Pembinaan Pengelola Aset Milik Pemprov Jateng	553.000.000	379.103.800	100%	68,55%	Balinfopasporapar dibubarkan pada bulan November 2018, sehingga kegiatan berhenti di bulan tersebut

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, memiliki 2 indikator kinerja program, dengan indikator kinerja program Presentase Daya Tarik Wisata yang Difasilitasi terealisasi 477 melebihi target 428 dengan tingkat capaian sebesar 111,45% dan sama dengan realisasi tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena terbentuknya DTW baru yang bersifat minat khusus; dan indikator kinerja program Presentase Desa Wisata yang difasilitasi terealisasi 229 Desa meningkat dari target 140 Desa dengan tingkat capaian sebesar 163,57% dan naik dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 147 Desa, hal ini disebabkan karena Masyarakat/Pamong Desa sudah mulai mengelola potensi lokal daerahnya untuk menjadi Desa Wisata baru.

Sebaran DTW tertinggi berada di Kota Semarang (68 DTW), Kabupaten Brebes (47 DTW), dan Kabupaten Kebumen (41 DTW), dengan jumlah terendah berada di Kabupaten Demak, Kabupaten Tegal dan Kota Pekalongan (masing-masing 5 DTW), Kota Tegal (4 DTW), serta Kabupaten Sukoharjo (3 DTW). Sedangkan jumlah Desa Wisata tertinggi berada di Kabupaten Klaten (24 Desa Wisata), Kabupaten Banjarnegara (20 Desa Wisata) serta Kabupaten Semarang (20 Desa Wisata), dengan jumlah terendah sebanyak 1 Desa Wisata berada di Kabupaten Blora, Kabupaten Pekalongan, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Tegal.



Dampak positif program ini, yaitu: meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, meningkatkan kualitas pelayanan wisatawan di DTW, meningkatkan peluang usaha masyarakat, meningkatkan pedapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar DTW.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah: 1. Peningkatan Manajemen Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata, dengan hasil: a. Pembinaan 8 usaha pariwisata di Jawa Tengah (8 kali/400 orang), b. Penyusunan direktori usaha pariwisata di Jawa Tengah (35 orang, 200 buku), c. Monitoring pengawasan pelaksanaan usaha pariwisata di Jawa Tengah (175 Usaha), dan d. Digitalisasi industri pariwisata di Jawa Tengah (13 Usaha, 35 orang); 2. Pengembangan Potensi Keunikan Lokal Masyarakat dan Alam Menjadi Atraksi Wisata, dengan hasil: a. Pengelolaan 50 Desa wisata di Jawa Tengah, b. Festival Desa Wisata se-Jawa Tengah, c. Penyusunan Profil Desa Wisata dan Daya Tarik Wisata, d. Pengembangan Pariwisata Lintas Sektoral 4 Kawasan (400 orang Lintas Sektoral), dan e. Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 4 kawasan (800 orang Pelaku Wisata); Penyusunan DED Terminal Aswatama dan Telaga Merdada Kawasan Dieng; Penataan Aset Milik Pemrov Jateng di Karimunjawa dan Api Abadi Mrapen; 3. Pemantapan Kinerja SDM Pariwisata, dengan hasil: a. Pembinaan Pramuwisata 25 orang dan pengawasan Pramuwisata 15 orang serta pembekalan substansi pariwisata kepada Saka Pariwisata 100 orang, b. Pembekalan Pramuwisata 40 orang dan fasilitasi Sertifikasi kompetensi Pramuwisata/tenaga kerja perhotelan 80 orang, c. Peningkatan dan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif (400 orang), d. fasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif (100 orang), dan e. Fasilitasi Pendampingan Sertifikasi HAKI (50 orang); 4. Optimalisasi Pengelolaan Sarana Pariwisata Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil: a. Pembinaan dan pengawasan hotel, b. Peningkatan kualitas SDM pengelola hotel, dan c. Peningkatan promosi hotel melalui *Fam Trip*; dan 5. Perkuatan Kualitas Kompetensi Remaja, Mas dan Mbak Duta Wisata Bidang Pariwisata, dengan hasil: a. Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah 2018 sebanyak 70 orang, dan b. Pemberdayaan Duta Wisata 15 orang, sedangkan kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah kegiatan Penataan DTW Goa Seplawan (DAK) dikarenakan perencanaan yang disusun tidak sesuai dengan DED Kabupaten Purworejo.



Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Fungsi : 2.10

Sub Fungsi : 2.10.01

Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Tersepanya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.01.0005.09	Program Pengembangan Kemitraan	2.575.000.000	2.391.204.646	100%	92,86%	
2.10.01.0005.09.0001	Kegiatan Koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan bidang pariwisata	600.000.000	555.338.300	100%	92,56%	Efisiensi anggaran
2.10.01.0005.09.0002	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan	1.325.000.000	1.230.061.680	100%	92,83%	Efisiensi anggaran dan sisa
2.10.01.09.0003	Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan pariwisata Jateng	400.000.000	389.681.554	100%	97,42%	
2.10.01.09.0004	Kegiatan Pemantauan & evaluasi pelaksanaan program / kegiatan pariwisata	250.000.000	216.123.112	100%	86,45%	Efisiensi Perjalanan dinas Luar daerah

Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, memiliki 2 indikator kinerja program, dengan indikator kinerja program Jumlah Kelompok Sadar Wisata terealisasi 463 melebihi target 415 dan meningkat dari realisasi tahun sebelumnya sebanyak 448 kelompok, hal ini disebabkan karena terbentuknya Pokdarwis baru di sekitar DTW dan Desa Wisata baru; dan indikator kinerja program Presentase Forum/Klaster Masyarakat Peduli Wisata yang difasilitasi 5 klaster sesuai dengan target dan sama dengan realisasi tahun sebelumnya.

Sebaran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tertinggi berada di Kota Surakarta (51 Pokdarwis), Kabupaten Karanganyar (41 Pokdarwis), dan Kabupaten Kebumen (32 Pokdarwis), dengan jumlah terendah sejumlah 2 Pokdarwis berada di Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Kota Magelang. Sedangkan Klaster Masyarakat Peduli Wisata hanya berada di Kabupaten Blora, Rembang, Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Semarang (masing-masing 1 Klaster). Dampak positif dari program ini, yaitu meningkatnya peluang usaha masyarakat di sekitar DTW serta meningkatkan kerjasama promosi pariwisata.

Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan, dengan hasil: a. Apresiasi dan konvensi pokdarwis 105 orang (Lomba Apresiasi Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Konvensi Pokdarwis), b. Pembinaan Pokdarwis 100 orang dan 1200 eksemplar panduan Sadar Wisata dan Sapta Pesona, c. Pembentukan Pokdarwis 1000 orang, dan d. Aktualisasi Sadar Wisata Sapta Pesona 30 orang; 2. Koordinasi dan



Kerjasama Dengan Pemangku Kepentingan Bidang Pariwisata, dengan hasil: a. Meningkatnya kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif antar Pemerintah/Provinsi (G to G) dan juga antar pelaku, b. Penguatan dan pendampingan Kota Kreatif 3 Kabupaten, c. Pengembangan klaster dan komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif 5 klaster, dan d. Dialog pariwisata dan dialog ekonomi kreatif; dan 3. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata Jawa Tengah, dengan hasil: Tersedianya rekomendasi usulan program dan kegiatan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019.

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Fungsi : 2.10

Sub Fungsi : 2.10.01

Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		Rp	Rp	Fisik (%)	Keu (%)	
2.10.01.0004.07	Program pengembangan pemasaran pariwisata	11.241.935.000	10.063.866.350	100%	89,52%	
2.10.01.0004.07.0001	Kegiatan Peningkatan Kualitas Promosi dan Informasi dalam pemasaran pariwisata	4.173.360.000	3.990.916.746	100%	95,63%	Efisiensi Perjalanan Dinas dan sisa LS
2.10.01.0004.07.0002	Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di Luar Negeri	500.000.000	361.144.540	100%	72,23%	efisiensi peserta kegiatan promosi di luar negeri (Keg. Di Jepang dan di Inggris)
2.10.01.0004.07.0004	Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam negeri	4.315.350.000	3.991.672.692	100%	92,50%	sisa lelang, efisiensi perjalanan dinas
2.10.01.0004.07.0005	Kegiatan pengembangan pasar pariwisata	1.978.225.000	1.507.790.792	100%	76,22%	Efisiensi Perjalanan Dinas dan sisa LS
2.10.01.0006.07.0003	Kegiatan Peningkatan kapasitas & kualitas pelayanan informasi pariwisata Jateng	275.000.000	212.341.580	100%	77,22%	Balinfopasporapar dibubarkan pada awal bulan November 2018, sehingga kegiatan berhenti di bulan oktober

Indikator kinerja program yang mencapai target antara lain: Jumlah Kunjungan Wisman terealisasi 677.168 orang melebihi dari target sejumlah 419.454 orang dengan tingkat capaian sebesar 155.67% namun dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 13,31%, hal ini dikarenakan adanya dampak bencana alam di Indonesia, penutupan Bandara Internasional Adi Sumarmo Solo serta perubahan trend wisata dari *mass tourism* menjadi *special interest tourism*; Jumlah Kunjungan Wisnus terealisasi 48.943.607 orang melebihi dari target sejumlah 34.825.055 orang dengan tingkat capaian sebesar 140,54 % dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 22,00%, hal ini disebabkan adanya dampak kemajuan teknologi promosi pariwisata melalui media digital dan media sosial serta meningkatnya jumlah event pariwisata di Kabupaten/Kota; Rata-rata pengeluaran belanja Wisman terealisasi sebesar 908,8 US \$ melebihi dari target 812,36 US\$ dengan tingkat capaian sebesar 111,87 % dibandingkan tahun sebelumnya naik sebesar 13,41% hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan nilai tukar



dolar terhadap rupiah (nilai tukar murah) sehingga berpengaruh pada struktur pengeluaran akomodasi, makan minum, souvenir dan struktur belanja lainnya; Rata-rata pengeluaran belanja Wisnus terealisasi sebesar Rp. 1.481.358,- melebihi dari target Rp. 1.458.957,- dengan tingkat capaian sebesar 101,54 % dibandingkan tahun sebelumnya naik sebesar 12,58% hal ini dikarenakan pengaruh kenaikan jumlah kunjungan wisnus terhadap struktur pengeluaran wisnus seperti akomodasi, makan minum, souvenir serta pengaruh dari sarpras yang tersedia (Jalan Tol, Transport Lokal, dll) serta Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB tercapai 3,19% melebihi dari target sebesar 3,08% dengan tingkat capaian sebesar 103,57% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,13%.

Sebaran jumlah kunjungan wisatawan nusantara tertinggi berada di Kota Semarang (5.703.282 orang), Kabupaten Magelang (4.626.065 orang), Kabupaten Purbalingga (3.798.280 orang) dan jumlah terendah berada di Kabupaten Blora (322.652 orang) serta Kota Salatiga (106.347 orang), Kabupaten Sukoharjo (51.949 orang). Sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara hanya tersebar di 25 Kabupaten/Kota dengan jumlah tertinggi berada di Kabupaten Magelang (345.730 orang), Kabupaten Klaten (186.719 orang), dan Kota Semarang (66.107 orang), sedangkan jumlah terendah berada di Kabupaten Kabupaten Grobogan (60 orang), Kabupaten Pekalongan(12 orang) dan Kabupaten Pati (5 orang). Dampak positif dari program ini, yaitu: meningkatnya pendapatan masyarakat disekitar Daya Tarik Wisata (DTW) dan (Pendapatan Asli Daerah) PAD Bidang Pariwisata.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah: 1. Peningkatan Kualitas Promosi dan Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata, dengan hasil: a. Bahan Promosi Cetak (35.000); b. Calendar of Events (4.000); c. Promosi melalui media Cetak dan Elektronik (10 Paket); d. Pemuatan Info Pariwisata Jawa Tengah di Media Massa (52 kali); dan e. Promosi melalui media digital (1 paket); 2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Informasi Pariwisata Jawa Tengah, dengan hasil: a. Updating Website dan Touchscreen, b. Rapat Teknis Promosi, dan c. Peningkatan Kemampuan SDM Pengelola TIC; 3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam Negeri, dengan hasil: a. Penyelenggaraan Borobudur *Art's Festival*, b. Penyelenggaraan Borobudur *Travel Mart and Expo (BTMX)*, c. Penyelenggaraan Dukungan *Sport Tourism Event*; d. Penyelenggaraan Partisipasi *Travel Mart* di Luar Provinsi; e. Penyelenggaraan *Colors of Culture Festival*; 4. Pengembangan Pasar Pariwisata, dengan hasil: a. *Roadshow* Pasar Potensial Jawa Tengah (4 kegiatan); b. Penyusunan *Passenger Exit Survey*(100 buku), c. Penyusunan Data Kepariwisataaan (100 Buku Data Kepariwisataaan, 100 Buku Saku); d. Penyusunan Roadmap Pengembangan Pasar Pariwisata Jawa Tengah (100 buku); dan e. FGD Rakortek Bidang Pemasaran (2 kali FGD, 1 kali Rakortek); dan 5. Pelaksanaan Promosi



Pariwisata di Luar Negeri, dengan hasil: Terselenggaranya Partisipasi pada Pameran Promosi di Asia dan Eropa sebanyak 3 kegiatan.

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Permasalahan dalam pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum Optimalnya Penerapan IPTEK olahraga dalam proses pembibitan, pemanduan dan pembinaan prestasi atlet termasuk atlet usia dini dan pelajar.
- 2) Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder baik instansi pemerintah, lembaga olahraga, maupun dunia usaha.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar yang ditetapkan..

Permasalahan dalam pembangunan sektor pariwisata di Jawa Tengah antara lain:

- 1) Belum optimalnya sebaran wisatawan ke Jawa Tengah.
- 2) Belum optimalnya sarana prasarana pemasaran pariwisata belum sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 3) Belum sinerginya pembangunan destinasi pariwisata ;
- 4) Kurang optimalnya kualitas daya tarik wisata di destinasi pariwisata ;
- 5) Belum optimalnya kualitas usaha pariwisata yang berdaya saing di bidang pariwisata.
- 6) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pariwisata yang berkompeten;
- 7) Belum optimalnya pemahaman kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan di destinasi pariwisata ;
- 8) Kurangnya pengembangan inovasi dan kreatifitas masyarakat lokal terhadap produk UMKM sektor pariwisata.
- 9) Kurang optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif.
- 10) Belum sinerginya kerjasama/kemitraan antar pelaku (pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat) dalam pembangunan kepariwisataan.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah *basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.*

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar



dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (*cash basis*) dengan metode penilaian atas dasar akrual (*accrual basis*).
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- d. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- e. Seluruh kekayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah per 1 Januari 2016 ;
- f. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perceptual*).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standart dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (*adjustment*) ke tahun buku berikutnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2016, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, di syahkan oleh Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;



- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, dan SKPD lainnya;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 POS-POS PENDAPATAN

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2.798.786.375,00 atau 105,61% dari target Rp 2.650.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.832.706.555,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	Rp 2.650.000.000,00	Rp 2.798.786.375, 00	105,61	Rp 2.832.706.555,00
Pendapatan Transfer				
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah				
Jumlah	Rp 2.650.000.000,00	Rp 2.798.786.375, 00	105,61	Rp 2.832.706.555,00

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2.798.786.375,00 atau 105,61% dari target Rp 2.650.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.832.706.555,00

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 2.650.000.000,00	Rp 2.797.036.375, 00		Rp 2.793.956.555, 00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		Rp 1.750.000,00		Rp 38.750.000,00
Jumlah	Rp 2.650.000.000,00	Rp 2.798.786.375, 00	105,61%	Rp 2.832.706.555, 00

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 Rp 2.797.036.375,00 atau 105,55 % dari target Rp 2.650.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.793.956.555,00:

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Jasa Usaha	Rp 2.285.300.000,00	Rp 2.793.956.555, 00	122,26	Rp 2.793.956.555, 00
Retribusi Perizinan Tertentu				
Jumlah	Rp 2.285.300.000,00	Rp 2.793.956.555, 00	122,26	Rp 2.793.956.555, 00

5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.797.036.375,00 atau 105,55 % dari target Rp 2.650.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.793.956.555,00:

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan	Rp 631.660.000,00	Rp 691.145.800,00	109,42	Rp 833.245.700,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	Rp 385.800.000,00	Rp 373.283.200,00	96,76	-
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	Rp 1.155.000.000,00	Rp 1.128.475.000,00	97,70	Rp 1.117.077.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 477.540.000,00	Rp 604.132.375,00	126,51	Rp 843.633.355,00
Jumlah	Rp 2.650.000.000,00	Rp 2.797.036.375, 00	105,55	Rp 2.793.956.555, 00



5.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 38.750.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan				
Tuntutan Ganti Rugi				
Pendapatan Denda keterlambatan				
Pendapatan Denda Pajak				
Pendapatan Denda Retribusi				
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda				
Pendapatan dari Pengembalian				
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum				
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
Penerimaan dari BLUD				
Penerimaan Lain-Lain		Rp 1.750.000,00		Rp 38.750.000,00
Jumlah		Rp 1.750.000,00		Rp 38.750.000,00

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 155.329.252.010,00 atau 93,50 % dari anggaran Rp 166.130.948.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 154.338.089.062,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp 45.810.180.000,00	Rp 44.927.045.126,00	98,07	Rp 46.450.409.194,00
Belanja Barang & Jasa	Rp 120.320.768.000,00	Rp 110.402.206.884,00	91,76	Rp 107.887.679.868,00
Jumlah	Rp 166.130.948.000,00	Rp 155.329.252.010,00	93,50	Rp 154.338.089.062,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 44.927.045.126,00 atau 98,07 % dari anggaran Rp 45.810.180.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 46.450.409.194,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	Rp 30.109.139.000,00	Rp 30.032.422.358,00	99,75	Rp 31.300.812.444,00
Belanja Pegawai langsung	Rp 15.701.041.000,00	Rp 14.894.622.768,00	94,86	Rp 15.149.596.750,00
Jumlah	Rp 48.476.719.000,00	Rp 46.450.409.194,00	98,07	Rp 46.450.409.194,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 110.402.206.884,00 atau 91,76 % dari anggaran Rp 120.320.768.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 107.887.679.868,00 dengan rincian sebagai berikut :



	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	7.031.817.000,00	6.712.869.400,00	95,46%	9.074.754.229,00
Belanja Bahan/Material	720.254.000,00	660.430.300,00	91,69%	577.870.200,00
Belanja Jasa Kantor	28.979.579.000,00	26.655.901.047,00	91,98%	21.301.661.644,00
Belanja Premi Asuransi	762.229.000,00	657.521.627,00	86,26%	499.121.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	518.000.000,00	472.251.391,00	91,17%	446.367.922,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.537.567.000,00	1.466.991.315,00	95,41%	1.691.536.360,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	20.934.650.000,00	19.112.852.594,00	91,30%	10.606.439.406,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.889.350.000,00	2.569.484.000,00	88,93%	5.377.885.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.419.599.000,00	6.098.041.000,00	94,99%	4.539.866.500,00
Belanja Makanan dan Minuman	11.953.480.000,00	10.889.473.820,00	91,10%	11.575.870.368,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	113.500.000,00	112.500.000,00	99,12%	89.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja	92.900.000,00	91.950.000,00	98,98%	32.150.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.321.948.000,00	2.743.221.500,00	82,58%	2.726.195.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	14.909.732.000,00	12.318.401.660,00	82,62%	10.452.719.870,00
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	220.000.000,00	219.725.000,00	99,88%	330.277.000,00
Belanja Pemeliharaan	2.050.091.000,00	1.918.741.200,00	93,59%	1.867.088.235,00
Belanja Jasa Konsultasi	652.940.000,00	634.229.080,00	97,13%	460.572.500,00
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	0,00	0,00	#DIV/0!	1.105.501.634,00
Belanja Bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat	485.000.000,00	440.284.350,00	90,78%	0,00
Belanja Hadiah barang	995.572.000,00	974.162.600,00	97,85%	555.853.000,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.732.560.000,00	15.653.175.000,00	99,50%	24.576.950.000,00
Jumlah	120.320.768.000,00	110.402.206.884,00	91,76%	107.887.679.868,00

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 151.068.487.711,00 atau 96,18 % dari anggaran Rp 157.069.185.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 81.614.480.678,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 1.610.817.000,00	Rp 1.582.183.139,00	96,15	Rp 532.805.350,00
Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 155.117.378.000,00	Rp 149.148.322.572,00	86,05	Rp 81.081.675.328,00
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	Rp 289.750.000,00	Rp 288.530.000,00	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 51.240.000,00	Rp 49.452.000,00	96,51	-
Jumlah	Rp 157.069.185.000,00	Rp 151.068.487.711,00	87,26	Rp 81.614.480.678,00



5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.582.183.139,00 atau 96,15 % dari anggaran Rp 1.610.817.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 532.805.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Angkut	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Bengkel	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	Rp 1.369.137.000,00	Rp 1.342.038.139,00	98,02	Rp 432.545.350,00
Belanja Alat-alat Studio dan komunikasi	Rp 43.180.000,00	Rp 42.420.000,00	98,24	Rp 100.260.000,00
Belanja Alat-alat Kesehatan	Rp 198.500.000,00	Rp 197.725.000,00	99,61	-
Belanja Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
Jumlah	Rp 1.610.817.000,00	Rp 1.582.183.139,00	97,70	Rp 532.805.350,00

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 149.148.322.572,00 atau 85,61 % dari anggaran Rp 155.117.378.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 81.081.675.328,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	Rp 155.117.378.000,00	Rp 149.148.322.572,00	86,05	Rp 81.081.675.328,00
Belanja Monumen	-	-	-	-
Jumlah	Rp 94.705.968.000,00	Rp 81.081.675.328,00	85,61	Rp 81.081.675.328,00

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 49.452.000,00 atau 96,51 % dari anggaran Rp 51.240.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	Rp 51.240.000,00	Rp 49.452.000,00	96,51	-
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	-	-	-	-
Pengadaan Alat Olahraga	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SILPA Tahun Anggaran 2018 sebesar (Rp 303.598.953.346,00) sedangkan Tahun 2017 sebesar (Rp Rp 233.119.863.185,00)



5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp 435.680.335.590,21 naik sebesar Rp 141.394.268.214,10 atau 48,05 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 294.286.067.376,11

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp 147.157.782,83 turun sebesar Rp 2.780.571.709,17 atau 94,97 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.927.729.492,00

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,- turun sebesar Rp 39.072.936,- atau 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 39.072.936,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu	0	39.072.936
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas BLUD		
Jumlah	0	39.072.936

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2017.

NO	URAIAN	2018	2017
1	Kas di BPP Balai Pasporapar	0	36.072.936
2			
	Jumlah	0	0

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

NO	URAIAN	2018	2017
1	-	-	-
2			
	Jumlah	-	-



Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2018 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	2018	2017
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2018.

NO	URAIAN	2018	2017
1	Pendapatan Retribusi Penerimaan Kekayaan Daerah	0	3.000.000
2			
	Jumlah	0	3.000.000



Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

NO	URAIAN	2017	2016
1	-	-	-
2			
	Jumlah	-	-

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1	-	-	-
2			
	Jumlah		

5.2.1.1.2. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2018 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2017 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp 146.323.782,83 turun sebesar Rp 13.509.549,17 atau 8.45% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 159.833.332,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Asuransi BMD	146.323.782,83	159.833.332,00
Asuransi Pegawai Non PNS		
Sewa		
Jumlah	146.323.782,83	159.833.332,00

5.2.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2018, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 834.000,00 turun



sebesar Rp 2.727.989.224,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.728.823.224,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Persediaan Bahan	834.000	28.444.200
Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Persediaan Obat-Obatan	0	-
Persediaan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		2.700.379.024
Persediaan Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		
Persediaan Natura dan Pakan	0	-
Jumlah	834.000	2.728.823.224

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp 461.940.183.960,00 naik sebesar Rp 137.002.794.240,00 atau 42,16% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 324.937.389.720,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp 290.913.896.884,11
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 151.068.487.711,00
Belanja Barang/Jasa	Rp -
Hibah	Rp -
Mutasi Masuk	Rp 602.714.431,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 1.882.069.560,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp -
Koreksi	Rp 130.991.304.735,00
Jumlah tambah	Rp 284.544.576.437,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp 137.000.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 1.882.069.560,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp 14.086.162.424,00
Mutasi Keluar	Rp 453.655.978,00
Koreksi	Rp 130.982.894.235,00
Jumlah pengurangan	Rp 147.541.782.197,00
Grand Total	Rp 461.940.183.960,00

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp 71.578.531.000,00 saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 75.266.690.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2018
Tanah	71.578.531.000	208.090.500	3.896.250.000	75.266.690.500
Jumlah	71.578.531.000	208.090.500	3.896.250.000	75.266.690.500

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 75.266.690.500,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp -
Belanja Barang/Jasa	Rp -
Hibah	Rp -
Mutasi Masuk	Rp -



Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi	Rp	208.090.500,00
Jumlah	Rp	208.090.500,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	3.896.250.000,00
Mutasi Keluar	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	3.896.250.000,00
Grand Total	Rp	71.578.531.000,00

Koreksi tambah tanah berasal dari pematangan lahan SKO Jatidiri senilai Rp 199.680.000,00 dan tanah di Goa Sepalawan Kabupaten Purworejo Rp 8.410.500,00 seluas 10.093 m². Reklasifikasi keluar ke aset lainnya berupa aset-aset yang dikerjasamakan yaitu :

- Tanah di Desa Krikilan Kalijambe Sragen (Museum Sangiran) seluas 9.125 m² senilai Rp 1.368.750.000,00
- Tanah di Desa Krikilan Kalijambe Sragen (Museum Sangiran) seluas 7.583 m² senilai Rp 1.132.500.000,00
- Tanah di Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden Purwokerto (Lahan Parkir Baturaden) seluas 3.275 m² senilai Rp 1.395.000.000,00

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp 20.620.712.370,00 turun sebesar Rp 8.440.370.832,00 atau 29,04 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 29.061.083.202,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Alat Berat	3.232.745.000		295.700.000	3.528.445.000
Alat Angkut	5.679.395.397	461.951.871	235.901.871	3.125.407.156
Alat Bengkel dan Ukur	45.300.000			45.300.000
Alat Pertanian dan Peternakan				
Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.910.031.221	343.975.000	29.950.500	6.267.135.817
Alat Studio dan Komunikasi	3.897.911.584	381.275.000		891.570.502
Alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				
Alat Keamanan				
Jumlah	29.061.083.202	1.269.701.871	265.852.371	13.365.504.475

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	29.061.083.202,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	1.582.183.139,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	
Hibah	Rp	



Mutasi Masuk	Rp	592.214.431,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	373.725.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	
Koreksi	Rp	
Jumlah Penambahan	Rp	2.548.122.570,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	137.000.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	333.725.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	10.064.112.424,00
Mutasi Keluar	Rp	453.655.978,00
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	10.988.493.402,00
Grand Total	Rp	20.620.712.370,00

Belanja modal sebesar Rp 1.582.183.139,00 terdiri dari : 1) Pengadaan Alat Fitnes (BPPLOP) sebesar Rp 197.725.000,00; 2) Pengadaan 5 unit Filling cabinet (BPPLOP) Rp 7.500.000,00; 3) Pembelian 4 unit AC Split (BPPLOP) Rp 20.000.000,00; 4) Pengadaan Fiberglass pelindung tempat latihan (BPPLOP) Rp 10.000.000,00; 5) Pengadaan Tirai/Korden (BPPLOP) Rp 39.974.000,00; 6) Pembuatan Pantry (BPPLOP) Rp 24.651.199,00 ; 7) Pengadaan meubelair 24 unit kursi kerja staff dan struktural (BPPLOP) Rp 24.000.000,00; 8) Pengadaan desain interior ruang Kasie (BPPLOP) Rp 114.780.000,00; 9) Pengadaan desain interior ruang kepala BPPLOP Rp 99.428.000,00; 10) Pengadaan Meubelair (BPPLOP) Rp 44.680.000,00; 11) Pengadaan 2 unit tempat sampah besar (Sekretariat) Rp 7.500.000,00; 12) Pengadaan integrasi jaringan internet satu pintu (BPPLOP) Rp 73.720.000,00; 13) Pengadaan 200 unit kursi rapat susun (Sekretariat) Rp 99.800.000,00; 14) Pengadaan 10 unit AC Split 2 PK (Sekretariat) Rp 59.350.000,00; 15) Pengadaan peralatan personal komputer (BPPLOP) Rp 73.740.000,00; 16) Pengadaan Personal komputer Rp 126.775.000,00; 17) Pembuatan 1 unit neon box untuk Kawasan Api Abadi Mrapen Rp 22.000.000,00; 18) Pembuatan 1 unit papan nama spot Api Abadi Mrapen Rp 21.500.000,00; 19) Pembuatan taplak meja rempel untuk hotel Pondok Slamet Rp 22.500.000,00; 20) Pengadaan 23 unit Desktop (Sekretariat) Rp 287.500.000,00; 21) Pengadaan 21 unit Printer (Sekretariat) Rp 67.717.440,00; 22) Pengadaan 1 unit Laptop Macbook (Sekretariat) Rp 24.960.000,00; 23) Pengadaan 15 unit UPS (Sekretariat) Rp 29.962.500,00; 24) Pengadaan 2 unit LCD Proyektor (Sekretariat) Rp 30.000.000,00; 25) Pengadaan 2 unit printer portabel (Sekretariat) Rp 10.000.000,00; 26) Pengadaan 1 unit mix wireless JK coustic (Sekretariat) Rp 2.200.000,00; 27) Pengadaan peralatan sound system Rp 35.220.000,00 (Sekretariat); 28) Pengadaan Jaringan telepon Rp 5.000.000,00

Mutasi Masuk sebesar Rp 592.214.431,00 terdiri dari : 1) kendaraan dinas dari BPKAD Toyota Innova th 2016 2.0 G MT (H9527GG) sebesar Rp 297.970.000,00; 2) kendaraan dinas dari Biro umu SETDA Toyota Innova Th 2009 (H 181) sebesar Rp 211. 648.338,00; 3) Meja kursi kerja dari BPKAD senilai Rp 8.416.096,00; 4) komputer dan printer dari BPKAD senilai Rp 74.180.000,00



Mutasi keluar sebesar Rp 453.655.978,00 terdiri dari : 1) Mutasi ke Biro umum sekda berupa Kendaraan dinas Toyota Innova G Th 2014 (H 9518) senilai Rp 255.921.978,00; 2) Mutasi kendaraan dinas ke Balai Pengendalian Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah I berupa kendaraan Honda Supra X Th 2003 Rp 10.614.000,00 dan Kendaraan roda 4 Rp 187.120.000,00

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 132.314.625.224,00 naik sebesar Rp 16.810.404.777,00 (14,55 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 115.504.220.447,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Gedung	128.136.867.813	149.198.082.572	132.607.278.795	111.546.064.036
Monumen	3.457.129.820	219.601.000		3.237.528.820
Bangunan Menara	57.678.000			57.678.000
Tugu Titik Kontrol	662.949.591			662.949.591
Jumlah	132.314.625.224	149.417.683.572	132.607.278.795	115.504.220.447

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 115.504.220.447,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 149.148.322.572,00
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 219.601.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp 49.760.000,00
Jumlah Penambahan	Rp 149.417.683.572,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 1.548.344.560,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp 125.800.000,00
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp 130.933.134.235,00
Jumlah Pengurangan	Rp 132.607.278.795,00
Grand Total	Rp 132.314.625.224,00

- Belanja Modal Rp 149.148.322.572,00 berupa : Pematangan lahan SKO senilai Rp 199.680.000,00; Pengadaan Bangunan Gedung tempat Olahraga senilai Rp 143.059.901.485,00; Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya senilai Rp 3.469.667.087,00; Pengadaan Bangunan Asrama senilai Rp 2.419.074.000,00
- Koreksi masuk senilai Rp 49.760.000,00 berupa Penyusunan Review DED Asrama Atlet perpindahan dari KDP menjadi aset Gedung.
- Reklasifikasi keluar antar aset tetap berupa KDP senilai Rp 1.288.743.560,00; monumen senilai Rp 219.601.000,00; reklasifikasi dari gedung ke peralatan mesin senilai 40.000.000 berupa pembelian komputer.



- Koreksi pengurangan berupa KDP senilai Rp 130.933.134.235,00 dan koreksi dari aset gedung ke tanah senilai Rp 199.680.000,00 (berupa pematangan lahan SKO).

5.2.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.970.413.541,00 saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.681.883.541,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Jalan dan Jembatan	817.042.818	0	0	817.042.818
Bangunan Air/Irigasi	314.630.091	263.550.000	0	51.080.091
Instalasi	225.454.455	0	0	225.454.455
Jaringan	613.286.177	24.980.000	0	588.306.177
Jumlah	1.970.413.541	288.530.000		1.681.883.541

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 1.681.883.541,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 288.530.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 288.530.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 0,00
Grand Total	Rp 1.681.883.541,00

Penambahan berasal dari belanja modal berupa pembuatan penerangan jalan Jatidiri sebesar Rp 24.980.000,00; pembuatan sumur artesis 1 titik sebesar Rp 139.600.000,00; pembuatan tandon air lengkap dan penataan saluran air sebesar Rp 123.950.000,00.

5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.969.481.490,00 naik sebesar Rp 59.952.000,00 atau 3.14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.909.529.490,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Buku Perpustakaan	237.609.500	49.452.000		188.157.500
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	1.731.871.990	10.500.000		1.721.371.990
Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah	1.969.481.490	59.952.000		1.909.529.490



Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 1.909.529.490,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 49.452.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp 10.500.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah penambahan	Rp 59.952.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah pengurangan	Rp 0,00
Grand Total	Rp 1.969.481.490,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 59.952.000,00 berasal dari belanja modal buku bahan perpustakaan senilai Rp 49.452.000,00 dan terdapat mutasi masuk sebesar Rp 10.500.000,00 berupa keyboard dan alat musik untuk pramuka.

5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 233.486.420.335,00 saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 101.513.982.540,00 dengan rincian sebagai berikut :

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Tgl kontrak	Nilai kontrak	Realisasi	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyusunan DED Asrama Atlet Jatidiri	Komplek GOR Jatidiri Semarang	Th 2016	Th 2016	755.700.000	755.700.000	100
2	Penyusunan DED Sekolah Khusus Olahraga	Komplek GOR Jatidiri Semarang	Th 2016	Th 2016	701.270.000	701.270.000	100
3	Penyusunan Review DED Penyempurnaan Stadion Jatidiri	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2/5581	01-11-2017	49.390.000	49.390.000	100
4	Penyusunan Review DED Penyempurnaan GOR Jatidiri	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2/5921.1	20-11-2017	48.500.000	48.500.000	100



5	Penyusunan Review DED Gedung Terpadu II	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2/6045.1	27-11-2017	44.150.000	44.150.000	100
No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Tgl kontrak	Nilai kontrak	Realisasi	Fisik (%)
6	Stadion Utama Jatidiri	Komplek GOR Jatidiri Semarang	Th 2018	19-11-2018	230.598.666.775	230.598.666.775	100
7	Penyusunan Review DED Renovasi GOR Jatidiri	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2/10073	22-10-2018	98.200.000	98.200.000	100
8	Penyusunan Review DED Renovasi Stadion Jatidiri	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2/10055	22-10-2018	99.551.000	99.551.000	100
9	Penyusunan DED Renovasi Gedung dan Fasilitas Lapangan Tenis	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2/10065	22-10-2018	96.960.000	96.960.000	100
10	Penyusunan DED Renovasi Gym Center	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2/10084	22-10-2018	76.500.000	76.500.000	100
11	Penyusunan DED Pembangunan Fasilitas Cabor Volley Pantai	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2/10078	22-10-2018	25.300.000	25.300.000	100
12	Penyusunan DED Renovasi Fasilitas Lapangan Tennis Outdoor	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2/10063	22-10-2018	96.965.000	96.965.000	100
13	Penyusunan DED Pembangunan Kolam Renang	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2/10057	22-10-2018	98.972.000	98.972.000	100
14	Penyusunan DED Renovasi Fasilitas Sepatu Roda	Komplek GOR Jatidiri Semarang	027.2./10059	22-10-2018	96.635.000	96.635.000	100
15	Penyusunan DED Rowo Jombor	Rowo Jombor	027.2/10053	22-10-2018	50.730.000	50.730.000	100
16	Penyusunan DED Goa Sepelawan Purworejo	Goa Sepelawan Purworejo	027.2/852	15-02-2018	47.900.000	47.900.000	100
17	Penyusunan DED Telaga Merdada Dieng	Dieng	027.2/4731	08-06-2018	258.601.000	258.601.000	100
18	Penyusunan DED Pembangunan Tempat Parkir Terminal Aswatama Dieng	Dieng	027.2/5960	27-07-2018	242.429.560	242.429.560	100
Jumlah					233.486.420.335	233.486.420.335	100

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp 101.513.982.540,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 1.288.743.560,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp



Jumlah Aset Lainnya

5.2.2. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 437.075.335.590,21 naik sebesar 142.789.268.214,10 atau 48,52% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 294.286.067.376,11

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA 2018. Pendapatan-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.798.786.375,00 turun sebesar Rp 8.345.998.845,00 atau 74,89 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 11.144.785.220,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Pendapatan Asli daerah	Rp 2.798.786.375,00	Rp 2.835.706.555,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah		Rp 8.309.078.665,00
Jumlah	Rp 2.798.786.375,00	Rp 11.144.785.220,00

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.798.786.375,00 turun sebesar Rp 36.920.180,00 atau 1,30 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.835.706.555,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Pendapatan Pajak Daerah	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 2.797.036.375,00	Rp 2.793.956.555,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp 1.750.000,00	Rp 38.750.000,00
Jumlah	Rp 2.798.786.375,00	Rp 2.835.706.555,00

5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.797.036.375,00 naik sebesar Rp 79.820,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.796.956.555,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Retribusi Jasa Umum	-	-
Retribusi Jasa Usaha	Rp 2.797.036.375,00	Rp 2.796.956.555,00
Retribusi Perizinan Tertentu		
Jumlah	Rp 2.793.956.555,00	Rp 2.796.956.555,00

5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.750.000,00 turun sebesar Rp 37.000.000,00 atau 95,48% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 38.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



	2018	2017
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-
Pendapatan Bunga	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Pendapatan Denda keterlambatan	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Penerimaan dari BLUD	-	-
Penerimaan Lain-Lain	Rp 1.750.000,00	Rp 38.750.000,00
Jumlah	Rp 1.750.000,00	Rp 38.750.000,00

5.3.1.2 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00 naik sebesar Rp 7.843.778.665,00 atau 1.685,75% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 8.309.078.665,00

5.1.1. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp 163.613.655.581,70 naik sebesar Rp 6.425.559.131,16 atau 4,09 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 157.188.096.450,54

5.1.1.1 Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp 163.613.655.581,70 naik sebesar Rp 6.425.559.131,16 atau 4,09 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 157.188.096.450,54

	2018	2017
Beban Pegawai	44.927.045.126,00	46.450.409.194,00
Beban Barang & Jasa	84.693.770.522,17	66.865.848.617,33
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.626.474.798,53	5.319.112.128,21
Beban Lainnya	28.366.365.135,00	
Jumlah	163.613.655.581,70	157.188.096.450,54

5.1.1.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp 44.927.045.126,00 turun sebesar Rp 1.523.364.068,00 atau 3.28 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 46.450.409.194,00

	2018	2017
Beban Pegawai Tidak langsung	30.109.139.000,00	31.300.812.444,00
Beban Pegawai Langsung	14.817.906.126,00	15.149.596.750,00
Jumlah	44.927.045.126,00	46.450.409.194,00

5.1.1.1.2. Beban Barang dan Jasa



Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp 84.693.770.522,17 naik sebesar Rp 17.827.921.904,84 atau 26,66 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 66.865.848.617,33

	2018	2017
Beban Persediaan	14.023.123.024,00	11.306.464.539,00
Beban Jasa	55.520.968.897,17	42.687.856.051
Beban Pemeliharaan	2.390.992.591,00	2.290.556.157,00
Beban Perjalanan Dinas	12.318.401.660,00	10.452.719.870,00
Beban Hibah	440.284.350,00	128.252.000,00
Jumlah	84.693.770.522,17	66.865.848.617,33

5.1.1.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp 5.626.474.798,53 naik sebesar Rp 307.362.670,00 atau 5,78 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 5.319.112.128,21

	2018	2017
Beban Penyusutan Aset Tetap	5.577.419.298,53	5.319.112.128,21
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	44.114.000,00	
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	4.941.500	0
Jumlah	5.626.474.798,53	5.319.112.128,21

5.1.1.1.4. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp 28.366.365.135,00 turun sebesar Rp 10.186.361.376,00 atau 26,42 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 38.552.726.511,00



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan gabungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara operasional khususnya pembangunan kepemudaan olahraga dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah

6.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi DISPORAPAR sebagai berikut:

6.1.1. Tugas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

6.1.2. Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

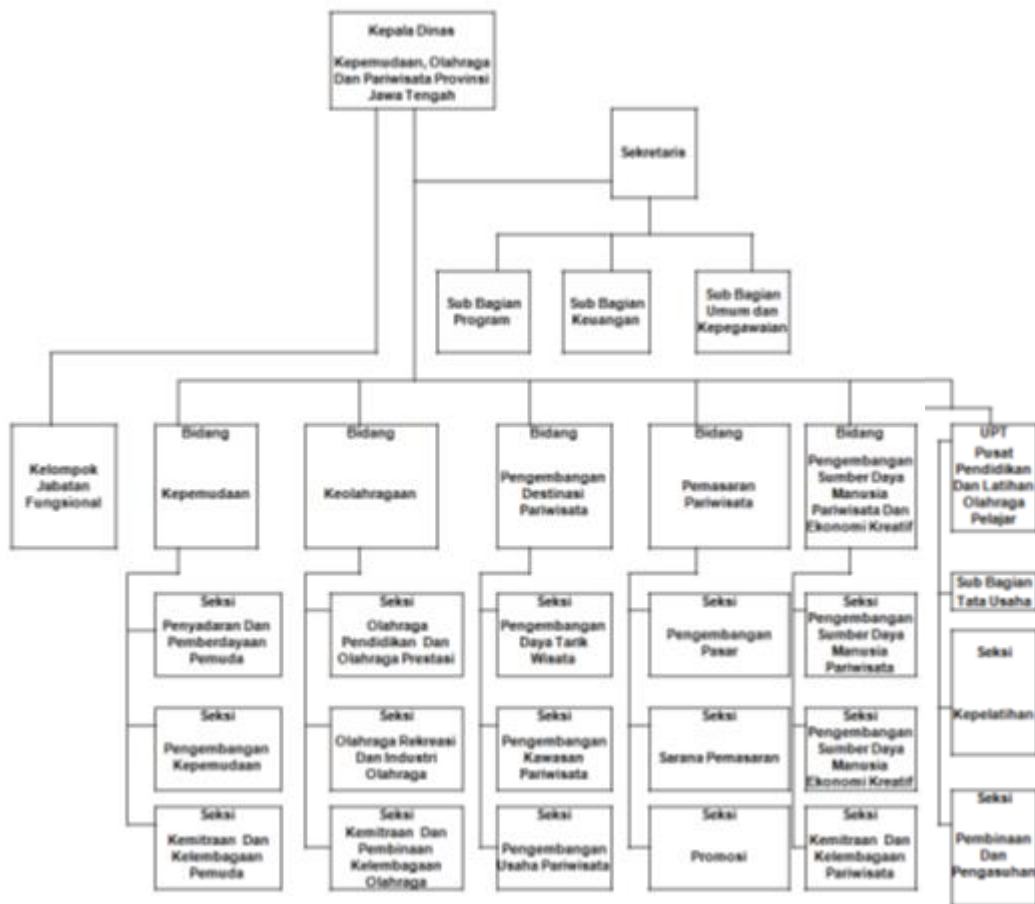
- Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan



- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Susunan dan Struktur Organisasi DISPORAPAR

Berikut adalah struktur organisasi DISPORAPAR sesuai Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah:



2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

2.2.1. Sumber Daya Kepegawaian

Sumber Daya Kepegawaian Disporapar berdasarkan eselon, selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	II	1
2	III	6
3	IV	19
JUMLAH		26



Berdasarkan struktur organisasi Disporapar terdapat 28 jabatan struktural, jumlah tersebut terdiri dari Kepala Dinas pada eselon II; Sekretaris, Kepala Bidang Keolahragaan, Kepala Bidang Kepemudaan, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Kepala UPT Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar, pada eselon III; serta Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasie Penysadaran dan Pemberdayaan Pemuda, Kasie Pengembangan Kepemudaan, Kasie Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda, Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, Kasie Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Kasie Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga, Kasie Pengembangan Daya Tarik Wisata, Kasie Pengembangan Kawasan Pariwisata, Kasie Pengembangan Usaha Pariwisata, Kasie Pengembangan Pasar, Kasie Sarana Pemasaran, Ka Sie Promosi, Kasie Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Kasie Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Kasie Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata, Kepala Seksi Tata Usaha, Kasie Kepelatihan, Kasie Pembinaan dan pengasuhan pada eselon IV.

Table 6.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	65
2	Bidang keolahragaan	27
3	Bidang Kepemudaan	21
4	Bidang Pemasaran Pariwisata	20
5	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	20
6	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	22
7	UPT Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar	40
Jumlah		215

Table 6.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	32
2	Golongan III	110
3	Golongan II	69
4	Golongan I	4
Jumlah		229

6.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6.4
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung kantor	3	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 12 Semarang
			Jl Pemuda No. 136 Semarang
			Jl. Pemuda No. 145 Semarang
2	Komplek Stadion	1	Komplek Stadion Jatidiri Semarang
3	Museum Olahraga Mrapen	1	Mrapen di Kab. Grobogan
4	Hotel	4	Hotel Karimunjawa Inn - Kab. Jepara
			Hotel Garuda Kopeng - Kab. Semarang
			Hotel Pondok Slamet - Kab. Banyumas
			Hotel Pringgosari - Kab. Karanganyar
5	Rest Area	1	Kabupaten Tegal



BAB VII

P E N U T U P

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2018.

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2018 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun yang berakhir 31 Desember 2018, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap catatan atas laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.